

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2016 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2016.

Berdasarkan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2016, dilaksanakan 12 program dan 47 kegiatan. Capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2016 dan prakiraan capaian kinerja program dan kegiatan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel II.1

Capaian kinerja tahun 2016 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2018 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2018, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rancangan Rencana Strategis (tahun 2021) dapat tercapai.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam kedudukannya sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Sosial Kabupaten Gresik mempunyai tugas untuk:

“Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial”.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Sosial Kabupaten Gresik mempunyai fungsi organik dan tata kerja sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan kebijakan urusan di bidang sosial;
2. Pengkoordinasian akselerasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan di bidang sosial;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan di bidang sosial;
5. Pengkoordinasian pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan di bidang sosial; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik tersebut di atas dijabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti yang termuat dalam dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2016-2021.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Gresik merumuskan kebijakan dan strategi yang dijabarkan dalam penentuan dan kegiatan tiap tahunnya dalam dokumen Rencana Kerja (RENJA). Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja sasaran, berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

1. Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah
2. Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur
3. Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur
4. Persentase fasilitasi terhadap pelaporan kinerja dan keuangan
5. Persentase fasilitasi terhadap UPT Balai LBK Cerme
6. Jumlah pelayanan dan pelatihan bagi PMKS
7. Rasio penanganan penyandang disabilitas

8. Jumlah penanganan eks penyandang penyakit sosial
9. Rasio perlindungan dan jaminan terhadap fakir miskin
10. Persentase panti asuhan yang dibina
11. Jumlah fasilitasi TMP
12. Jumlah legiun veteran, janda veteran dan perintis kemerdekaan yang diberikan bantuan Tali Asih
13. Jumlah peserta sosialisasi peningkatan nilai kepahlawanan
14. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang dibina
15. Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang dibina
16. Jumlah Keluarga Rentan yang dibina

Untuk tahun 2018, target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan dalam Rancangan RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, dapat dilihat pada tabel II.2

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik selama ini, permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kesejahteraan sosial dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Jumlah PMKS cenderung meningkat, dikarenakan semakin kompleksnya permasalahan sosial. Krisis ekonomi, kenaikan harga BBM, kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, terjadinya pemutusan hubungan kerja dan melambungnya harga kebutuhan hidup sehari-hari dapat menyebabkan munculnya orang-orang miskin baru dan orang-orang yang dekat dengan kemiskinan.
2. Belum optimalnya pelayanan dan penanganan PMKS. Semakin meningkatnya jumlah PMKS di Kabupaten Gresik membuat Dinas Sosial Kabupaten Gresik harus terus menerus melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan

terkait penyediaan sarana prasarana dan mutu pelayanan yang memadai sesuai standar pelayanan menjadi tuntutan masyarakat yang harus diwujudkan. Penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial ke dalam pengelompokan isu-isu strategis kesejahteraan sosial terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat melalui program Gresik Bebas Pasung, anak terlantar, anak jalanan melalui program Gresik bebas Anjal, gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila (WTS) melalui program Bebas Lokalisasi dan Lokasi.

3. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat (PSKS). Kelembagaan sosial masyarakat dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Selain itu, dapat berperan sebagai penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk mendukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka mendukung program pemberdayaan kelembagaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut :
 - a. Pemberdayaan Karang Taruna;
 - b. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
 - c. Pemberdayaan LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga);
 - d. Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) di tingkat desa;
 - e. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di tingkat Kecamatan.

Kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat potensi sumber daya kesejahteraan sosial dari kelembagaan sosial masyarakat. Peran Karang Taruna, PSM, LK3, WKSBM dan TKSK sangat penting untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat.

4. Masih rendahnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial. Seiring dengan perkembangan gaya hidup individualisme dalam masyarakat secara simultan juga berkembang pergeseran nilai dalam masyarakat berupa lunturnya rasa kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan, kepedulian dan keharmonisan sosial serta makin rendahnya nasionalisme yang ditunjukkan dengan menurunnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kebangsaan/kepahlawanan dan penghargaan terhadap keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 dirumuskan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kabupaten berdasarkan usulan program dan kegiatan SKPD yang termuat dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang diperoleh langsung maupun dari hasil musrenbang kecamatan diseleksi untuk disesuaikan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan yang sesuai dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Gresik akan diakomodir dalam Rancangan Rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 untuk dimusyawarahkan dalam forum SKPD, untuk kemudian disepakati dan dijadikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Adapun usulan-usulan program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel II.3.